

Katalog BPS: 4601009.53

RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010 - 2014



**RINGKASAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2010 - 2014**



RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2014

ISSN : 2528-2131
Katalog BPS : 4601009.53
No. Publikasi : 53520.1601
Ukuran buku : 19,05 cm x 25,40 cm
Jumlah Halaman : iii + 29

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :
© BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggangdakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Kata Pengantar

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009.

Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei-survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui review surat kabar dan review dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi, partai politik, politisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang, sangat diharapkan.

Kupang, Januari 2016
Kepala BPS Provinsi NTT,



Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si
NIP. 19661116 198901 2 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| - Apakah IDI itu..... | 1 |
| - Aspek, Variabel dan Indikator IDI..... | 2 |
| - Metodologi Pengumpulan data IDI..... | 3 |
| - Review Surat Kabar dan Review Dokumen..... | 4 |
| - Focus Group Discussion (FGD)..... | 5 |
| - Wawancara Mendalam (In-dept Interview)..... | 6 |
| - Tahapan Penghitungan IDI..... | 7 |
| - Perkembangan IDI di NTT 2010-2014..... | 8 |
| - Perkembangan Nilai Indeks setiap Aspek..... | 9 |
| - Perkembangan Nilai Indeks setiap Variabel..... | 10 |
| - Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat..... | 11 |
| - Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berpendapat.... | 12 |
| - Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berkeyakinan... | 13 |
| - Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan dari Diskriminasi | 14 |
| - Perkembangan Nilai Indeks Per Variabel..... | 15 |
| - Perkembangan Skor Indikator Pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih..... | 16 |
| - Perkembangan Skor Indikator Pada Variabel Hak Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan..... | 17 |
| - Perkembangan Nilai Indeks Per Variabel Dalam Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi..... | 18 |
| - Perkembangan Skor Indikator Pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi..... | 19 |
| - Perkembangan Skor Indikator Pada Variabel Peran DPRD..... | 20 |
| - Perkembangan Skor Indikator Pada Variabel Peran Parpol..... | 21 |
| - Perkembangan Skor Indikator Pada Variabel Peran Birokrasi Pemda..... | 22 |
| - Perkembangan Skor Indikator Pada Variabel Peran Peradilan yang Independen..... | 23 |
| - Lampiran | 24 |

Apakah IDI itu?



- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi politik provinsi di Indonesia.
- IDI telah disusun sejak tahun 2007. IDI 2007 merupakan embrio IDI berikutnya. Namun, indikator dan metode penghitungan yang digunakan dalam IDI 2007 berbeda dengan IDI sesudahnya sehingga secara teknis tidak dapat dibandingkan.
- Komponen IDI terdiri dari **3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator**

Aspek, Variabel, dan Indikator IDI 2009 - 2014
(3 aspek; 11 variabel; and 28 indikator)

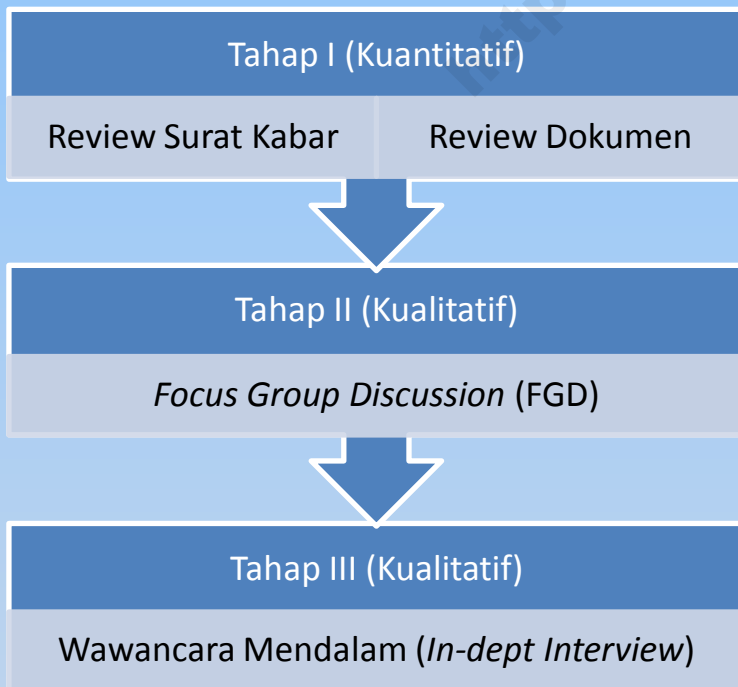
| Aspek | Variabel | Indikator |
|-------------------|---|-------------|
| Kebebasan Sipil | Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | 2 indikator |
| | Kebebasan Berpendapat | 2 indikator |
| | Kebebasan Berkeyakinan | 3 indikator |
| | Kebebasan dari Diskriminasi | 3 indikator |
| Hak-Hak Politik | Hak Memilih dan Dipilih | 5 indikator |
| | Hak Partisipasi Politik: Pengambilan Keputusan dan Pengawasan | 2 indikator |
| Lembaga Demokrasi | Pemilu yang Bebas dan Adil | 2 indikator |
| | Peran DPRD | 3 indikator |
| | Peran Partai Politik | 2 indikator |
| | Peran Birokrasi Pemerintah Daerah | 2 indikator |
| | Peran Peradilan yang Independen | 2 indikator |

Metodologi Pengumpulan Data IDI



Metode pengumpulan data dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu :

- ❑ Pendekatan kuantitatif
Pendekatan kuantitatif dikumpulkan melalui review surat kabar dan review dokumen.
- ❑ Pendekatan kualitatif
Pendekatan kualitatif dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.



Rujukan awal berupa data kuantitatif sebagai sumber data utama

Kualitatif; mengkonfirmasi, meluruskan, dan melengkapi hasil review surat kabar dan dokumen

Review Surat Kabar dan Review Dokumen

Review Surat Kabar

- Surat kabar terkemuka di setiap provinsi periode 1 Januari – 31 Desember tiap tahunnya.
- Surat kabar telah dipilih sejak IDI 2007
- Ditentukan berdasarkan:
 - a. Oplah terbesar
 - b. Independensi
- IDI NTT menggunakan surat kabar harian Pos Kupang.

Review Dokumen

- Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang masih berlaku.
contoh: perda, pergub, perbup/perwali, surat kepala dinas, dll
- Catatan administrasi resmi, seperti jumlah anggota DPRD terpilah jenis kelamin dari Sekretariat Dewan, kepengurusan partai politik terpilah jenis kelamin, data kegiatan kaderisasi dari partai politik, dll.

Focus Group Discussion (FGD)

Tujuan FGD IDI:

1. Mengkonfirmasi fakta yang terkait dengan temuan review surat kabar dan dokumen.
2. Menambah informasi terkait dengan kasus-kasus yang dianggap besar/menarik.
3. Menelusuri kasus-kasus yang relevan dan belum tercatat dalam data review surat kabar dan dokumen.

Peserta FGD:

1. Merupakan sumber data utama yang akan digali informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang terkait indikator.
2. Mewakili profesi, kelompok, pengalaman, pengetahuan, jabatan, atau yang dianggap relevan lainnya.

Pelaksanaan FGD:

FGD dilaksanakan dua hari, dengan rincian:

- Hari I : Kebebasan Sipil
- Hari II : Hak-hak Politik dan Kinerja Institusi Demokrasi.

Hasil FGD:

Dapat melengkapi data hasil review surat kabar dan review dokumen.

Wawancara Mendalam (*In-dept Interview*)

- Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* surat kabar dan dokumen serta FGD.
- Dalam proses pengumpulan data, wawancara mendalam bersifat komplementer melengkapi ketiga metode lainnya.
- Wawancara mendalam dilakukan setelah FGD guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD.
- Narasumber wawancara mendalam adalah orang-orang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terkait indikator IDI.

Tahapan Penghitungan IDI

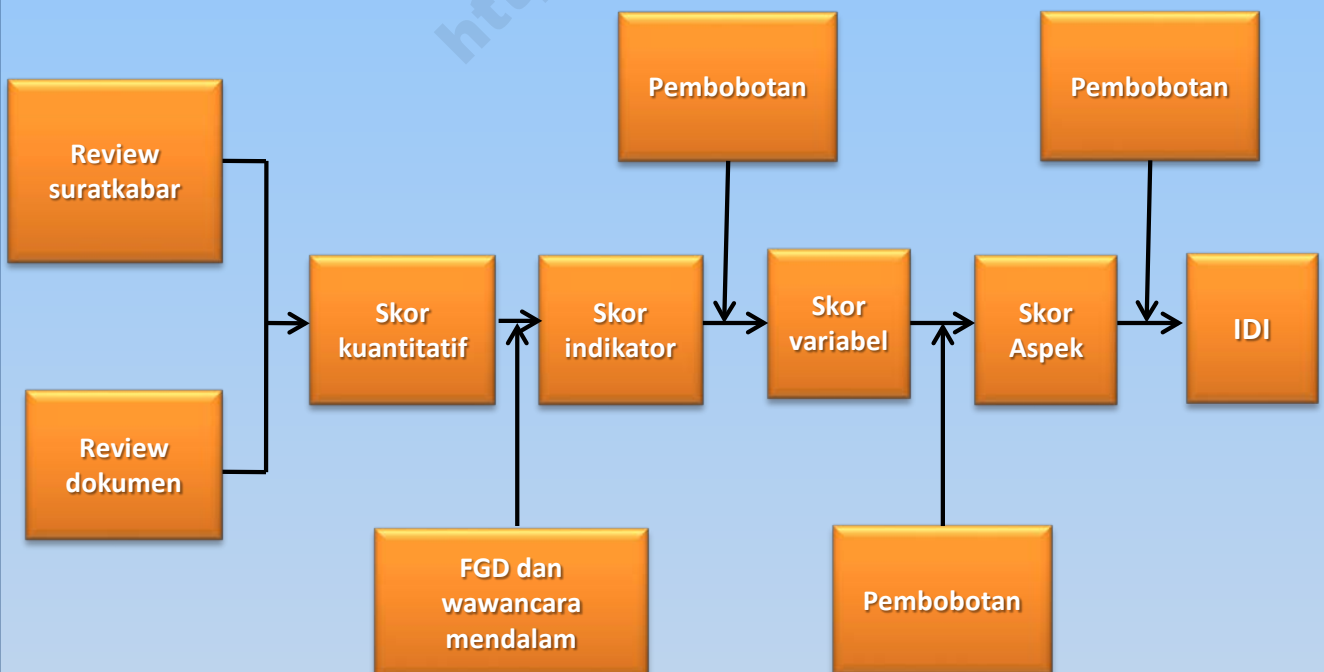


Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja demokrasi digunakan skala 0-100. Skala tersebut dibagi dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu:

- Baik, lebih besar dari 80
- Sedang antara 60 sampai dengan 80
- Kurang, lebih kecil dari 60

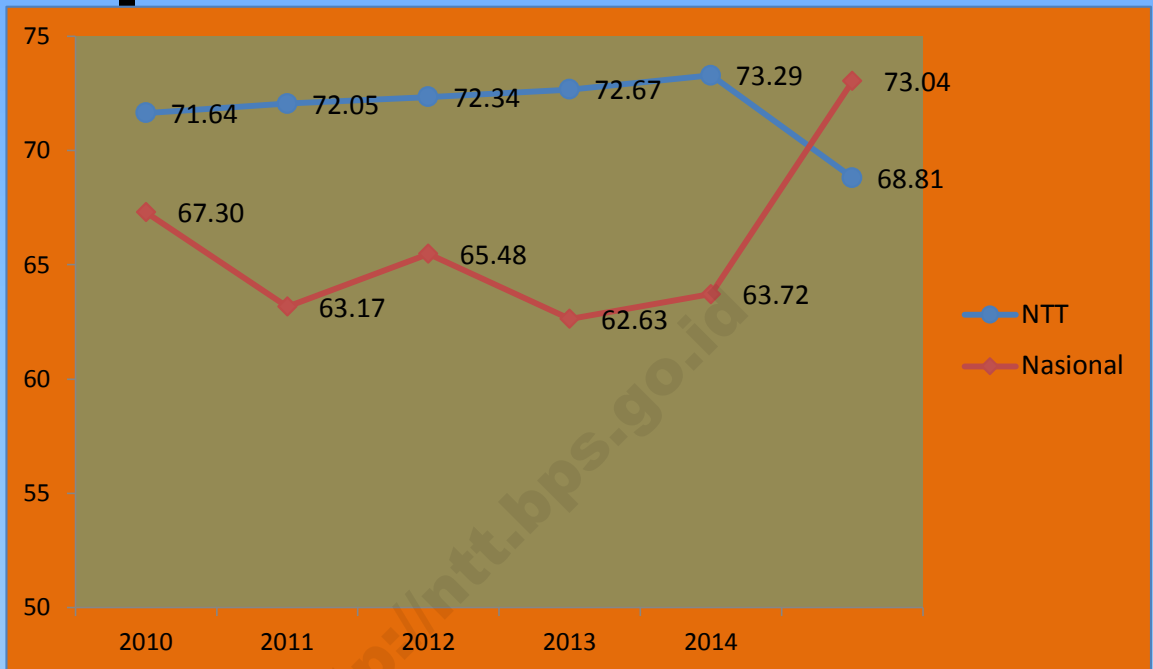
Tahapan Penghitungan IDI



PERKEMBANGAN IDI

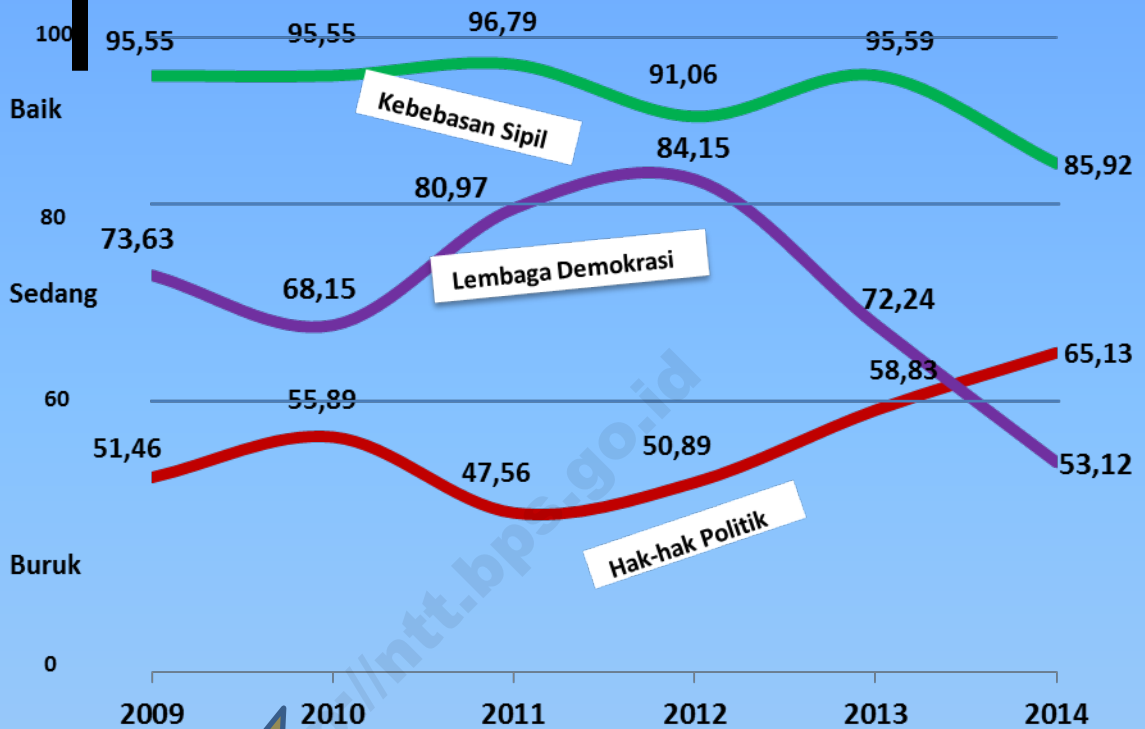
<http://www.bps.go.id>

Perkembangan IDI NTT 2010 - 2014



Selama periode 2010-2014, mengalami trend peningkatan akan tetapi tahun 2014 mengalami penurunan (2009 sebesar 71,64; 2010 sebesar 72,05, 2011 sebesar 72,34, 2012 sebesar 72,67, 2013 sebesar 73,29, dan 2014 sebesar 68,81). Angka ini menunjukkan bahwa **DEMOKRASI** di NTT pada tingkat **SEDANG**

Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Aspek, IDI NTT 2009 – 2014

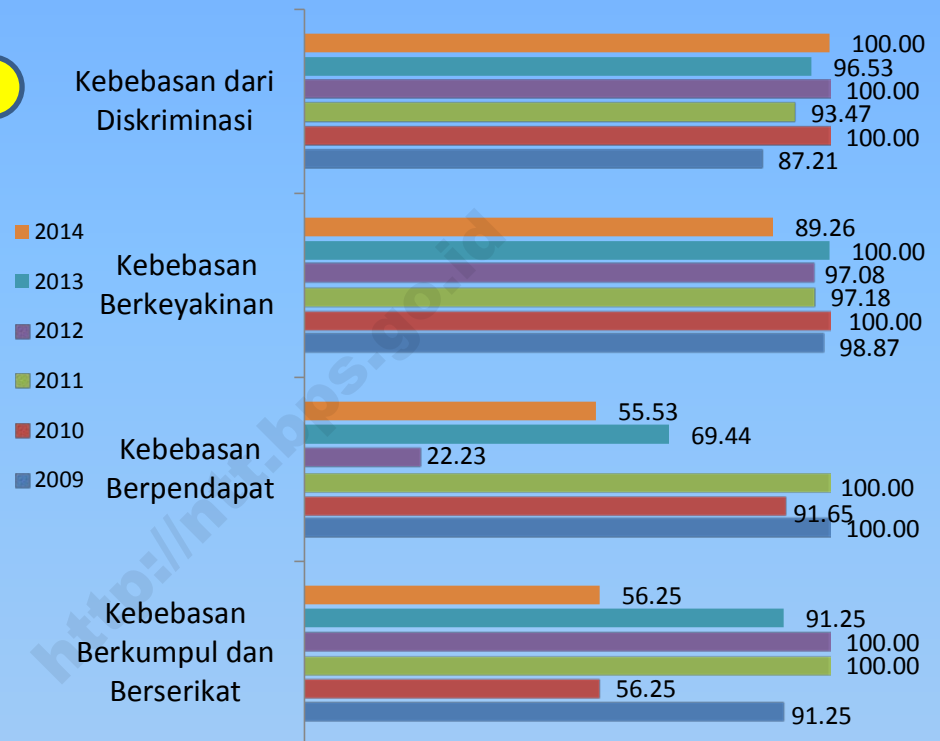


Tahun 2014 Aspek lembaga-lembaga demokrasi memberikan kontribusi nilai indeks paling kecil dibanding aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik

- Aspek kebebasan sipil menunjukkan nilai indeks cenderung menurun selama periode tahun 2009 – 2014.
- Aspek hak-hak politik menunjukkan kontribusi yang rendah dan cenderung menurun selama periode 2009-2012 akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2013 bahkan pada tahun 2014 berada pada level kinerja demokrasi sedang.
- Selama periode 2009-2012, aspek lembaga-lembaga demokrasi menunjukkan tren meningkat yaitu dari 73,63 pada tahun 2009 menjadi 84,15 pada tahun 2012. Akan tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 53,12 pada 2014.

Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil, IDI NTT 2010-2014

Pada tahun 2014, nilai indeks variabel kebebasan berpendapat menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibanding variabel lain pada aspek kebebasan sipil.



Dari gambar diatas, selama periode 2010-2014 dari empat variabel dalam aspek kebebasan sipil, variabel kebebasan berkumpul dan berserikat dan variabel kebebasan berpendapat menunjukkan tren peningkatan nilai indeks akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebaliknya variabel kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi menunjukkan perubahan yang relatif stabil.

Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2011- 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat | 100,00 | 100,00 | 91,25 | 56,25 |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 50,00 |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Indeks variabel kebebasan berkumpul dan berserikat disumbang oleh skor dua indikator yang terdapat didalamnya yaitu indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta indikator jumlah jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Selama periode 2011-2014, skor indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami penurunan menjadi 50,00 pada tahun 2014, sedangkan indikator jumlah jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat relatif stabil pada skor indeks 100,

Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berpendapat, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Variabel kebebasan berpendapat | 100,00 | 22,23 | 69,44 | 55,53 |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 100,00 | 16,67 | 73,33 | 66,67 |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 00,00 |

Selama periode 2011-2014, kontribusi skor dua indikator dalam variabel kebebasan berpendapat menunjukkan penurunan indeks. Sementara pada tahun 2014 nilai indeks variabel kebebasan berpendapat menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebelumnya yang disumbang oleh penurunan skor indikator-indikatornya. Pada tahun 2014, skor indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat sangat rendah sebesar 66,67 dan skor indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat sebesar 0. Penurunan capaian indeks variabel kebebasan berpendapat pada tahun 2014 mengindikasikan adanya peningkatan kekerasan atau penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat, baik dilakukan oleh aparat pemerintah daerah maupun sesama masyarakat.

**Perkembangan Skor Indikator pada
Variabel Kebebasan Berkeyakinan,
Aspek Kebebasan Sipil
Hasil IDI 2011 - 2014**

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Variabel kebebasan berkeyakinan | 97,18 | 97,08 | 100,00 | 89,26 |
| Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya | 75,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 40,00 |

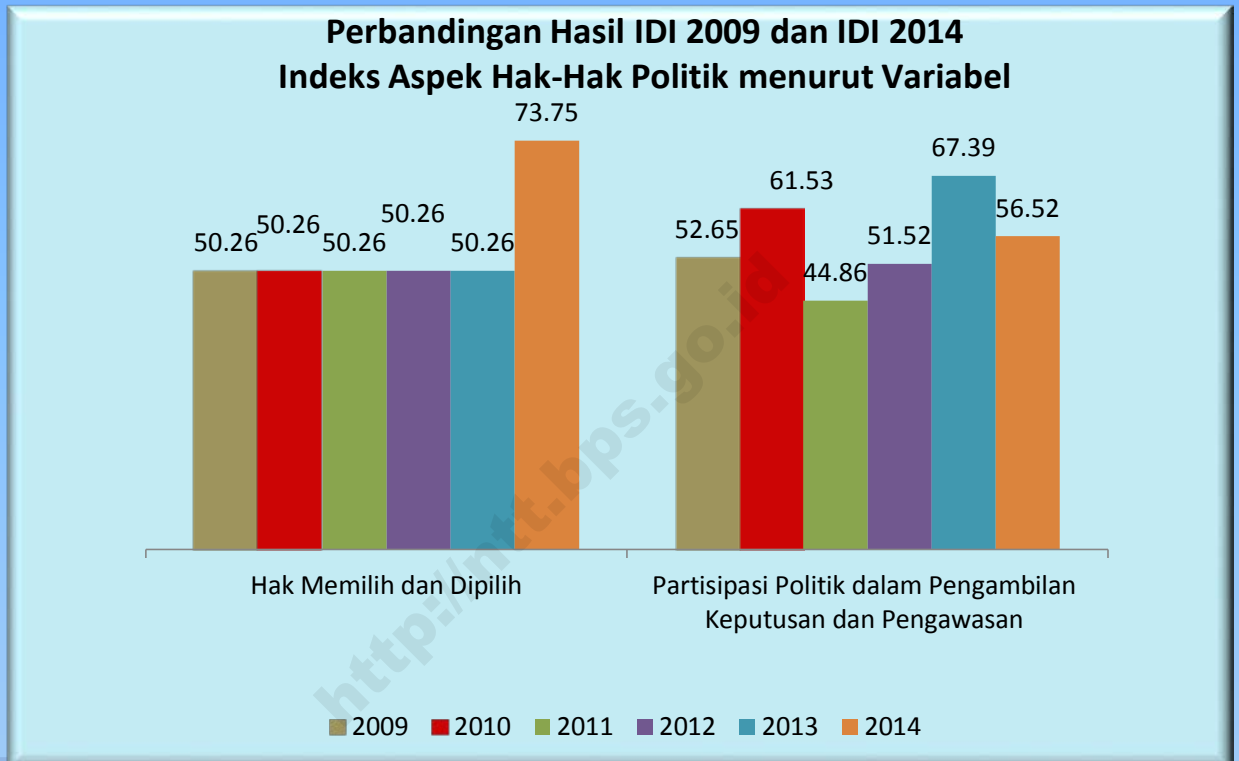
Variabel kebebasan berkeyakinan menunjukkan tren menurun selama periode 2011-2014. Pada tahun 2014, nilai indeks variabel kebebasan berkeyakinan menunjukkan angka terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 89,26

Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan dari Diskriminasi, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Variabel kebebasan dari diskriminasi | 93,47 | 100,00 | 96,53 | 100,00 |
| Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100,00 | 100,00 | 87,5 | 100,00 |
| Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Selama periode 2011-2014, variabel kebebasan dari diskriminasi menunjukkan peningkatan nilai indeks, meskipun sedikit fluktuatif di tahun 2011 dan 2013. Pada tahun 2014, skor indikator pada variabel kebebasan dari diskriminasi menyumbangkan nilai indeks maksimum. Hal ini mencerminkan bahwa tidak ada hambatan dalam upaya pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di NTT.

Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil, IDI NTT 2009-2014



Aspek hak-hak politik menunjukkan tren peningkatan selama periode 2009-2014. Nilai indeks yang cenderung meningkat dari aspek-aspek hak-hak politik dapat dilihat dari nilai indeks dua variabel di dalamnya yang memang cenderung meningkat. Pada variabel hak memilih dan dipilih nilai indeks tidak pernah berubah dari capaian tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 73,75. Sementara variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan tren fluktuatif, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sedikit dibanding 2013 yaitu menjadi 56,52..

Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih, Aspek Hak-Hak Politik Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Variabel hak memilih dan dipilih | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 73,75 |
| Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 96,79 |
| Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
| Kualitas daftar pemilih tetap | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 75,14 |
| Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>) | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 76,56 |
| Persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 30,77 |

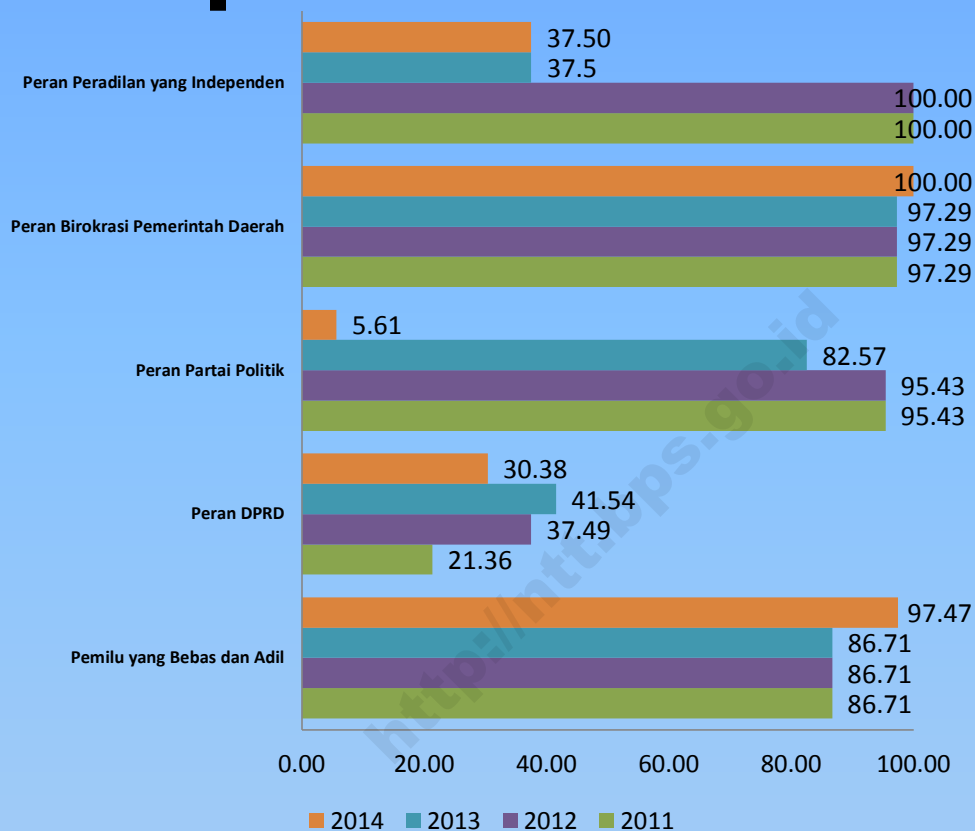
Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 dan 2014, sehingga skor indikator yang dihasilkan tidak mengalami perubahan sampai tahun 2013, kecuali indikator persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang memungkinkan terjadi perubahan. Variabel ini mengalami kenaikan di tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya, atau dengan kata lain terjadi perbaikan nilai indeks tahun pileg 2014 dibanding 2009..

Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, Aspek Hak-Hak Politik Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan | 44,86 | 51,52 | | |
| | | | 67,39 | 56,52 |
| Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok | 0,00 | 3,04 | | |
| | | | 34,78 | 13,04 |
| Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 89,72 | 100,00 | | |
| | | | 100,00 | 100,00 |

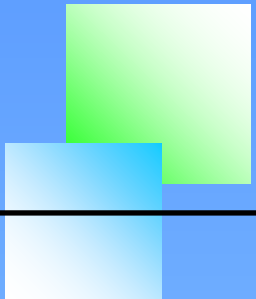
Indeks variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan disumbang oleh skor dua indikator didalamnya. Selama 2011-2014, skor dua indikator yang termasuk dalam variabel ini menunjukkan peningkatan. Skor indikator pertama, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan menunjukkan tren kenaikan. Sementara skor indikator kedua, yaitu pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dari 89,72 pada tahun 2011 menjadi 100,00 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan semakin tingginya partisipasi politik warga masyarakat terkait pengaduan tentang berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi, IDI NTT 2011-2014



Peran Partai Politik dan DPRD memberikan kontribusi terkecil pada aspek lembaga-lembaga demokrasi

Aspek lembaga-lembaga demokrasi terdiri dari 5 variabel. Dua variabel merujuk pada pemilu legislatif 2009 dan 2014 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil serta peran birokrasi pemerintah daerah dan perubahan terjadi pada tahun 2014.. Kontribusi nilai indeks dua variabel lainnya yaitu variabel peran parpol dan peran peradilan yang independen menunjukkan tren penurunan selama periode 2011-2014. Sementara untuk periode yang sama, nilai indeks variabel peran DPRD menunjukkan penurunan pada tahun 2014 dibanding sebelumnya, dimana pada tahun 2011 mencapai nilai paling rendah sebesar 21,36.



Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Variabel Pemilu yang bebas dan adil | 86,71 | 86,71 | 86,71 | 97,47 |
| Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 94,94 |

Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 dan 2014 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan kecuali tahun 2014

Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran DPRD, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Variabel peran DPRD | 21,36 | 37,49 | 41,54 | 30,38 |
| Besaran alokasi anggaran pendidikan | 29,90 | 16,55 | 79,30 | 41,09 |
| Besaran alokasi anggaran kesehatan | 26,82 | 78,35 | | |
| Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 0,00 | 10,00 | 7,14 | 12,50 |
| Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 14,29 | 25,00 | 50,00 | 7,14 |

Dalam rentang tahun 2009-2012, baru pada tahun 2012 terdapat 1 perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD

Selama periode 2011-2014, kontribusi skor indikator besaran alokasi anggaran pendidikan menunjukkan tren menurun yaitu dari 79,30 pada tahun 2013 menjadi 41,09 pada tahun 2014. Sebaliknya, indikator persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan dan indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif menunjukkan tren meningkat pada periode yang sama.

Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Parpol, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Variabel peran parpol | 95,43 | 95,43 | 82,57 | 5,61 |
| Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 100,00 | 100,00 | 85,71 | 0,00 |
| Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 56,09 |

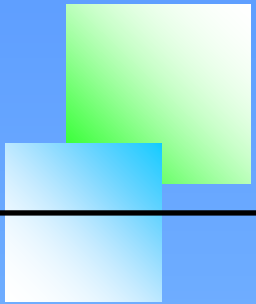
Pada tahun 2013-2014, variabel peran partai politik mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan periode 2011-2012. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu. Sementara persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi menunjukkan tren relatif stabil selama periode 2011-2014.



Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Birokrasi Pemda, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Variabel peran birokrasi Pemda | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 100,00 |
| Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon /parpol tertentu dalam pemilu legislatif | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 100,00 |
| Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 100,00 |

Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 dan 2014 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan sampai tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014



Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Peradilan yang Independen, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Variabel peran peradilan yang independen | 100,00 | 100,00 | 37,50 | 37,50 |
| Keputusan hakim yang kontroversial | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Selama periode 2011-2012, variabel peran peradilan yang independen memberikan kontribusi indeks yang baik. Hanya pada tahun 2013-2014 ditemukan keputusan hakim yang kontroversial sehingga nilai indeks mengalami penurunan menjadi 37,50 pada indikator tersebut.

LAMPIRAN

<http://ntt.br.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 3. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2011

| Provinsi | Indeks Keseluruhan | Aspek Demokrasi | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | Kebebasan Sipil | Hak-hak Politik | Lembaga-lembaga Demokrasi |
| NAD | 55,54 | 58,65 | 47,90 | 63,77 |
| Sumut | 66,15 | 79,23 | 59,47 | 60,31 |
| Sumbar | 65,02 | 60,57 | 59,21 | 79,83 |
| Riau | 70,65 | 83,12 | 52,90 | 83,18 |
| Jambi | 70,46 | 91,62 | 46,27 | 82,27 |
| Sumsel | 67,92 | 84,05 | 49,41 | 77,05 |
| Bengkulu | 71,36 | 94,10 | 59,47 | 61,63 |
| Lampung | 74,08 | 93,14 | 61,15 | 70,64 |
| Babel | 67,13 | 88,27 | 47,11 | 72,33 |
| Kep. Riau | 70,78 | 87,15 | 56,00 | 73,66 |
| DKI Jakarta | 77,81 | 89,94 | 58,32 | 93,50 |
| Jawa Barat | 66,18 | 78,92 | 46,42 | 81,55 |
| Jawa Tengah | 65,59 | 84,05 | 46,29 | 73,04 |
| DIY | 71,67 | 87,22 | 52,35 | 82,81 |
| Jawa Timur | 55,98 | 71,58 | 40,32 | 61,23 |
| Banten | 67,37 | 80,41 | 44,57 | 87,18 |
| Bali | 74,20 | 95,44 | 50,08 | 85,79 |
| NTB | 54,49 | 55,45 | 49,60 | 61,06 |
| NTT | 72,34 | 96,79 | 47,56 | 80,97 |
| Kalbar | 74,86 | 97,15 | 49,34 | 87,38 |
| Kalteng | 76,28 | 92,56 | 54,73 | 90,04 |
| Kalsel | 66,47 | 56,33 | 64,25 | 82,76 |
| Kaltim | 66,37 | 91,84 | 45,12 | 68,10 |
| Sulut | 71,19 | 98,44 | 52,86 | 66,03 |
| Sulteng | 64,00 | 92,23 | 37,01 | 71,36 |
| Sulsel | 65,31 | 80,97 | 39,33 | 86,87 |
| Sultra | 57,56 | 85,81 | 29,18 | 67,11 |
| Gorontalo | 62,77 | 81,80 | 44,36 | 68,08 |
| Sulbar | 66,36 | 94,80 | 42,65 | 68,26 |
| Maluku | 68,38 | 90,70 | 46,14 | 75,61 |
| Maluku Barat | 59,17 | 90,04 | 32,61 | 62,56 |
| Papua Barat | 61,78 | 93,59 | 43,99 | 50,03 |
| Papua | 59,05 | 87,73 | 29,43 | 70,04 |
| INDONESIA | 65,48 | 80,79 | 47,54 | 74,72 |

LAMPIRAN

Tabel 4. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2012

| Provinsi | Indeks Keseluruhan | Aspek Demokrasi | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | Kebebasan Sipil | Hak-hak Politik | Lembaga-lembaga Demokrasi |
| NAD | 54,02 | 60,16 | 47,16 | 57,21 |
| Sumut | 58,51 | 73,85 | 49,82 | 53,01 |
| Sumbar | 60,82 | 57,10 | 50,85 | 81,32 |
| Riau | 67,00 | 80,21 | 47,16 | 81,89 |
| Jambi | 68,81 | 86,23 | 46,60 | 82,18 |
| Sumsel | 73,17 | 93,26 | 55,21 | 76,42 |
| Bengkulu | 61,70 | 77,76 | 48,93 | 61,79 |
| Lampung | 72,26 | 94,14 | 50,60 | 79,16 |
| Babel | 69,37 | 83,09 | 51,21 | 80,97 |
| Kep. Riau | 65,61 | 82,68 | 49,98 | 68,95 |
| DKI Jakarta | 77,72 | 88,11 | 62,52 | 88,81 |
| Jawa Barat | 57,05 | 65,93 | 46,58 | 62,51 |
| Jawa Tengah | 63,79 | 75,03 | 46,29 | 77,46 |
| DIY | 72,96 | 87,39 | 55,52 | 82,52 |
| Jawa Timur | 54,99 | 80,97 | 36,17 | 52,22 |
| Banten | 65,29 | 79,20 | 51,03 | 70,42 |
| Bali | 71,75 | 94,18 | 45,00 | 86,01 |
| NTB | 57,97 | 58,31 | 49,60 | 70,85 |
| NTT | 72,67 | 91,06 | 50,89 | 84,15 |
| Kalbar | 65,38 | 92,37 | 37,18 | 76,23 |
| Kalteng | 65,78 | 68,44 | 51,05 | 85,82 |
| Kalsel | 61,13 | 49,51 | 52,59 | 89,33 |
| Kaltim | 71,23 | 97,16 | 51,69 | 69,68 |
| Sulut | 76,50 | 95,64 | 58,65 | 80,77 |
| Sulteng | 64,97 | 93,43 | 37,65 | 72,55 |
| Sulsel | 68,55 | 87,07 | 43,74 | 84,66 |
| Sultra | 57,26 | 91,39 | 29,50 | 58,44 |
| Gorontalo | 59,37 | 73,25 | 50,76 | 55,59 |
| Sulbar | 63,65 | 88,67 | 35,92 | 76,22 |
| Maluku | 59,68 | 76,05 | 45,08 | 62,27 |
| Maluku Barat | 66,83 | 88,15 | 50,13 | 66,55 |
| Papua Barat | 65,70 | 94,42 | 45,74 | 61,27 |
| Papua | 60,71 | 91,11 | 32,99 | 66,50 |
| INDONESIA | 62,63 | 77,94 | 46,33 | 69,28 |

LAMPIRAN

Tabel 4. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2013

| Provinsi | Indeks Keseluruhan | Aspek Demokrasi | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | Kebebasan Sipil | Hak-hak Politik | Lembaga-lembaga Demokrasi |
| NAD | 63,56 | 71,78 | 48,59 | 76,97 |
| Sumut | 58,80 | 73,65 | 49,50 | 54,90 |
| Sumbar | 54,11 | 54,88 | 38,97 | 77,17 |
| Riau | 68,37 | 77,71 | 52,19 | 82,32 |
| Jambi | 64,41 | 84,95 | 41,91 | 74,34 |
| Sumsel | 67,12 | 91,45 | 50,32 | 63,22 |
| Bengkulu | 59,17 | 71,57 | 49,28 | 59,28 |
| Lampung | 63,13 | 70,75 | 45,47 | 81,58 |
| Babel | 68,79 | 85,16 | 50,60 | 77,09 |
| Kep. Riau | 66,50 | 80,08 | 49,63 | 76,21 |
| DKI Jakarta | 71,18 | 88,72 | 55,08 | 74,69 |
| Jawa Barat | 65,18 | 79,84 | 46,74 | 76,05 |
| Jawa Tengah | 60,84 | 79,18 | 46,29 | 60,89 |
| DIY | 72,36 | 90,78 | 50,65 | 83,69 |
| Jawa Timur | 59,32 | 71,37 | 35,43 | 82,10 |
| Banten | 69,79 | 81,39 | 51,03 | 85,00 |
| Bali | 72,22 | 92,55 | 52,87 | 77,38 |
| NTB | 57,22 | 59,68 | 49,60 | 66,24 |
| NTT | 73,29 | 95,59 | 58,83 | 68,23 |
| Kalbar | 67,52 | 97,54 | 49,36 | 58,61 |
| Kalteng | 64,15 | 81,89 | 50,69 | 63,21 |
| Kalsel | 63,71 | 58,03 | 56,35 | 82,54 |
| Kaltim | 68,13 | 92,14 | 55,36 | 58,20 |
| Sulut | 73,11 | 92,44 | 62,55 | 65,56 |
| Sulteng | 64,50 | 90,03 | 36,78 | 76,44 |
| Sulsel | 65,20 | 81,30 | 50,62 | 68,10 |
| Sultra | 52,61 | 84,32 | 28,95 | 50,32 |
| Gorontalo | 67,21 | 79,31 | 58,26 | 66,22 |
| Sulbar | 64,02 | 88,51 | 44,05 | 64,94 |
| Maluku | 66,23 | 81,52 | 50,53 | 71,95 |
| Maluku Barat | 64,06 | 83,67 | 48,94 | 63,40 |
| Papua Barat | 60,70 | 92,33 | 35,93 | 60,26 |
| Papua | 60,92 | 90,21 | 31,37 | 71,01 |
| INDONESIA | 63,72 | 79,00 | 46,33 | 72,24 |

LAMPIRAN

Tabel 4. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2014

| Provinsi | Indeks Keseluruhan | Aspek Demokrasi | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | Kebebasan Sipil | Hak-hak Politik | Lembaga-lembaga Demokrasi |
| NAD | 72,29 | 69,76 | 63,94 | 88,73 |
| Sumut | 68,02 | 79,86 | 61,97 | 62,75 |
| Sumbar | 63,99 | 47,21 | 61,82 | 88,56 |
| Riau | 68,40 | 74,35 | 59,74 | 74,69 |
| Jambi | 71,15 | 78,23 | 54,01 | 89,48 |
| Sumsel | 74,82 | 86,09 | 63,57 | 78,53 |
| Bengkulu | 71,70 | 79,49 | 63,98 | 74,16 |
| Lampung | 71,62 | 72,06 | 63,69 | 83,66 |
| Babel | 75,32 | 89,80 | 56,48 | 87,01 |
| Kep. Riau | 68,39 | 82,47 | 58,35 | 66,61 |
| DKI Jakarta | 84,70 | 91,72 | 73,94 | 92,97 |
| Jawa Barat | 71,52 | 83,95 | 65,22 | 65,89 |
| Jawa Tengah | 77,44 | 87,87 | 67,08 | 80,77 |
| DIY | 82,71 | 86,25 | 76,07 | 88,82 |
| Jawa Timur | 70,36 | 81,62 | 56,29 | 78,54 |
| Banten | 75,50 | 81,10 | 63,68 | 87,22 |
| Bali | 76,13 | 92,16 | 61,27 | 79,56 |
| NTB | 62,62 | 58,73 | 62,08 | 68,38 |
| NTT | 68,81 | 85,92 | 65,13 | 53,12 |
| Kalbar | 80,58 | 98,44 | 63,12 | 85,84 |
| Kalteng | 79,00 | 92,93 | 66,42 | 81,48 |
| Kalsel | 70,84 | 58,43 | 76,45 | 77,53 |
| Kaltim | 77,77 | 93,28 | 70,42 | 69,94 |
| Sulut | 83,94 | 93,56 | 80,89 | 76,68 |
| Sulteng | 74,36 | 86,56 | 59,01 | 83,42 |
| Sulsel | 75,30 | 86,27 | 73,99 | 63,58 |
| Sultra | 70,13 | 90,89 | 53,20 | 70,92 |
| Gorontalo | 73,82 | 82,19 | 63,67 | 79,41 |
| Sulbar | 76,69 | 90,22 | 63,64 | 80,39 |
| Maluku | 72,72 | 90,85 | 60,03 | 70,09 |
| Maluku Barat | 67,90 | 76,90 | 60,61 | 68,16 |
| Papua Barat | 65,65 | 97,93 | 39,29 | 66,93 |
| Papua | 62,15 | 85,69 | 42,51 | 63,75 |
| INDONESIA | 73,04 | 82,62 | 63,72 | 75,81 |

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124

E-mail: bps5300@bps.go.id

Web site: <http://ntt.bps.go.id>



9 772528 213002